

Kemitraan Australia-Indonesia Untuk Keadilan Tahap 3

LEMBAR FAKTA

Australia dan Indonesia telah bermitra selama lebih dari sepuluh tahun dalam penguatan sektor peradilan dan keamanan. Berangkat dari pencapaian atas kerja sama jangka panjang, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan Tahap 3 (AIPJ3) melanjutkan dukungan untuk prioritas pembangunan Indonesia (RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029), dan sesuai dengan *Australia-Indonesia Development Partnership Plan 2024-2028*.

Pemerintah Australia akan memberikan kontribusi hingga AUD 63 juta, sementara Pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan non-finansial (*in-kind*). AIPJ3 akan berjalan selama lima tahun (Mei 2025-Mei 2030), dengan opsi perpanjangan apabila capaian program memuaskan dan berdasar pada kesepakatan dari kedua pemerintah.

Melalui AIPJ3, Australia dan Indonesia bertujuan untuk bekerja sama mendukung reformasi sektor peradilan dan keamanan.

AIPJ3 akan mendukung institusi peradilan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perencanaan, anggaran, dan praktik yang efektif pada ruang lingkup prioritas kebijakan yang telah disetujui. Program ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama pada sektor peradilan untuk manfaat bersama, termasuk antara institusi di Indonesia dan Australia, dan dengan organisasi masyarakat sipil.

AIPJ3 berfokus pada **tujuh prioritas kebijakan** yang penting bagi kedua negara:



Transparansi dan Akuntabilitas

Memperkuat mekanisme integritas dan akuntabilitas institusi, termasuk pemantauan langkah-langka pencegahan anti korupsi dan sistem informasi hukum.



Reformasi Peradilan Pidana

Mengadopsi reformasi peradilan pidana yang terintegrasi yang mengurangi kepadatan lapas dan meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam sistem peradilan pidana.



Hukum Komersial dan Respon terhadap Perubahan Iklim

Reformasi kebijakan dan peraturan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mengurangi hambatan hukum terhadap iklim investasi, dan bekerja sama dengan mitra non-pemerintah untuk mengatasi perubahan iklim dalam reformasi hukum.



Pencegahan Ekstremisme Kekerasan

Memperkuat kapasitas dan kolaborasi antara pemerintah dengan mitra non-pemerintah untuk mencegah ekstremisme kekerasan.



Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas

Mendukung kemitraan antar pemerintah untuk penanggulangan kejahatan lintas batas di kawasan.



Akses yang Sama terhadap Keadilan

Meningkatkan akses terhadap keadilan untuk perempuan, anak dan penyandang disabilitas agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan prosedur yang tidak memihak untuk akses terhadap keadilan.



Perempuan dalam Kepemimpinan

Mendorong partisipasi dan kepemimpinan perempuan di institusi hukum dan keamanan.

Mitra utama AIPJ3 meliputi:



Pemerintah Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Kepolisian Negara RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah daerah dan lembaga lainnya.



Pemerintah Australia: Department of Foreign Affairs and Trade, Federal Court of Australia, Federal Circuit and Family Court of Australia, Australian Federal Police, Australian Border Force and Australian Department of Home Affairs.



Non-pemerintah: Organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, sektor swasta.